

## PENDIDIKAN DASAR: PEMBANGUNAN MANUSIA BERKUALITAS DALAM MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) 2015

Luh Gede Meydianawathi

### ABSTRACT

*The obligation to prepare human capital which is started from the early age through the government program “Wajib Belajar 9 Tahun” will take longer time than it should. This effort is not equal with human manufacturing because human can not be developed instantly. A human should be developed in more qualified steps dan sustainable to be exactly become intelligence, qualified and dynamic human.*

*With some proper indicators for instance School Enrollment Ratio, Literacy and the amount of drop out student, each region in Indonesia could count their own readiness to implementing the agreement of Millenium Development Goals (MDGs), which is all the primary aged student whether they are boys or girls, in the whole part of the world deserve to access school in the year of 2015.*

*Keywords: primary education, School Enrollment Ratio, Literacy, Drop Out Student, MDGs*

### Pendahuluan

Salah satu isu global yang menjadi pembahasan dalam United Nations Millenium Summit tahun 2000 adalah pendidikan dasar bagi anak-anak. Isu ini menjadi penting untuk diselesaikan apalagi setelah PBB melaporkan sekitar 77 juta anak-anak usia sekolah dasar yang belum bersekolah. Padahal pendidikan dasar mutlak diperlukan sebagai suatu syarat penting bagi pengembangan manusia berkualitas di negara manapun di dunia. Karena itu sangat tepat bila Indonesia turut meratifikasi kesepakatan Millennium Development Goals (MDGs) agar seluruh anak usia sekolah dasar baik laki-laki maupun perempuan, dimana saja di seluruh penjuru dunia sudah bisa sekolah pada tahun 2015.

Pemerintah kemudian menunjukkan komitmen seriusnya untuk menangani persoalan pendidikan dasar di negara ini melalui penetapan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap anak, untuk tumbuh menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, seperti tertera dalam UU SPN:

*“setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (Pasal 6 Ayat (1))”.*

Untuk tercapainya tujuan tersebut, maka tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan dasar ini bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga menjadi tanggung jawab tiap-tiap pemerintah daerah. Dasar hukumnya adalah Pasal 11 Ayat (1) dan (2) UU SPN, yaitu:

*“pemerintah dan pemerintah daerah wajib*

*memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi; pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”.*

Anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah sebesar 20 persen dari total APBN/APBD, diharapkan mampu mensubsidi penduduk usia sekolah terutama yang berasal dari keluarga ekonomi menengah kebawah. Dengan demikian setiap anak akan memperoleh kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan dasar. Namun dalam konteks negara yang baru mulai bangkit dari keterpurukan krisis multidimensional, keterbatasan dan ketidakmampuan pemerintah menyebabkan anggaran 20 persen untuk pendidikan tersebut tak sepenuhnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam APBN 2005 misalnya, pemerintah hanya menganggarkan 9,3 persen dari total anggaran. Sedangkan pada 2006, pemerintah hanya mampu mengucurkan sekitar 12 persen atau sekitar Rp 33,70 triliun. Alasan pemerintah belum memenuhi anggaran pendidikan 20 persen sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, Pasal 31 ayat 4, karena kondisi keuangan negara yang tidak mencukupi (Harefa, 2007).

Akan tetapi, tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan dasar tidak boleh ditinggalkan. Meski minim dana dari pemerintah, masyarakat tetap berusaha memahami dan menerima kondisi tersebut, dengan

memberi dukungan dan partisipasi, misalnya berupa swadaya masyarakat dalam pengelolaan sekolah-sekolah swasta. Meskipun demikian pemerintah tetap saja tidak boleh mangkir dari kewajibannya untuk memberikan pendidikan dasar yang layak bagi anak-anak di seluruh wilayah Indonesia tanpa ada diskriminasi. Sebab memang tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program pendidikan dasar, seperti yang tertuang dalam MDGs, tidak diukur berdasarkan tinggi rendahnya anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah. Melainkan diukur dari kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan manusia yang berkualitas, dimulai dari usia anak-anak hingga dewasa.

### Indikator Pengukur Kemajuan Target Pendidikan Dasar

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (Wikipedia Indonesia, 29/7/2008). Berdasarkan jenjangnya pola pendidikan di Indonesia dibedakan menjadi empat jenjang, antara lain: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

Konstrain negara-negara dunia dalam meningkatkan mutu kualitas manusia melalui jalur pendidikan adalah dengan menekankan pada pendidikan dasar untuk anak-anak usia sekolah dasar. Target tersebut sejalan dengan program pendidikan dasar di Indonesia yang dikenal dengan program Wajib Belajar Sembilan Tahun, yaitu enam tahun di sekolah dasar (untuk anak usia 7-12 tahun) dan tiga tahun di sekolah lanjutan tingkat pertama (untuk anak usia 13-15 tahun). Dengan demikian, sasaran MDGs untuk Indonesia lebih tinggi daripada standar internasional untuk pendidikan dasar.

Untuk menilai tingkat keberhasilan setiap daerah di Indonesia dalam melaksanakan program pendidikan dasar ini, dipergunakan suatu indikator atau ukuran, yang selama ini selalu dipergunakan dan telah dimasyarakatkan oleh badan dunia UNESCO (Suyono, 2000). Beberapa indikator tersebut antara lain:

Pertama, menggunakan Angka Partisipasi Murni (APM) atau Net Enrolment Ratio pada tingkat Pendidikan Dasar. Angka partisipasi murni diperoleh dengan menjumlahkan seluruh anak usia sekolah dasar yang sedang sekolah dari suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah. Penjumlahan anak usia sekolah dari suatu daerah ini adalah dengan memisahkan anak yang berasal dari daerah lainnya. Begitu juga pembagiannya adalah anak usia sekolah dari daerah yang bersangkutan. Angka partisipasi murni ini

berbeda dengan angka partisipasi kasar yang biasanya termasuk anak-anak yang sedang sekolah tetapi berasal dari daerah lainnya. Itulah sebabnya sering terjadi bahwa suatu sekolah di perkotaan atau suatu sekolah di daerah yang dianggap bagus, mempunyai nilai partisipasi di atas 100 persen.

Kedua, menggunakan angka buta aksara suatu daerah yang diukur dari indikator buta aksara penduduk usia 15-24 tahun. Ukuran ini menjadi standar yang selama ini dikembangkan oleh UNESCO untuk mengukur index kualitas penduduk atau human development index. Dengan adanya ukuran ini, setiap negara diharuskan melakukan upaya pemberantasan buta aksara bagi generasi muda agar anak muda dan remaja segera bisa melepaskan diri dari kemiskinan. Ukuran ini sekaligus menjadi arahan dari upaya pemberantasan buta aksara yang dimasa lalu banyak dilakukan dengan arahan yang keliru, yaitu pemberantasan buta aksara tanpa memperhatikan usia sasaran yang digarap (dilakukan kepada penduduk di atas usia 50 tahun saja).

Ukuran ketiga, menggunakan proporsi murid di kelas 1 yang berhasil menyelesaikan sembilan tahun pendidikan dasarnya. Kalau semua anak yang masuk bisa terus sampai kelas lima maka tidak ada anak yang drop-out atau anak yang tertinggal kelas. Oleh karena itu ukuran ini mengharuskan adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk mencegah agar tidak ada anak-anak yang drop-out karena alasan apapun. Atau tidak ada anak yang tertinggal kelas karena kemiskinan atau tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, sehingga peranan sekolah, orang tua dan masyarakat sangat penting.

### Pencapaian Target Pendidikan Dasar di Provinsi Bali

Kurikulum wajib belajar sembilan tahun di Indonesia ditempuh pada jenjang pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Karena itu pembahasan setiap indikator pencapaian target pendidikan dasar di Provinsi Bali akan menggunakan data statistik pendidikan tingkat SD dan SLTP.

1. Tingkat Partisipasi Anak Usia 7-15 Tahun dalam Wajib Belajar Sembilan tahun di Propinsi Bali pada Tahun 2006.

Tingkat partisipasi anak usia sekolah dasar yang dihitung melalui Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD (untuk usia 7-12 tahun) dan SLTP (untuk usia 13-15 tahun) ini, akan memberikan gambaran mengenai rasio antara jumlah anak usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk total pada masing-masing kelompok umur, di Sembilan Kabupaten/Kota di Bali. Data AMP tingkat SD dan SLTP di Provinsi Bali pada tahun 2006 seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. TAngka Partisipasi Murni pada SD dan SLTP Di Provinsi Bali Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, Tahun 2006 (persen)

Kabupaten/Kota	SD		Total	SMP		Total
	Laki-laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan	
01. Jembrana	97.64	99.12	98.13	92.34	82.44	87.98
02. Tabanan	99.18	100	99.59	94.21	93.41	93.88
03. Badung	100	97.82	98.97	93.16	94.94	94.03
04. Gianyar	97.06	98.16	97.64	90.07	87.9	89.09
05. Klungkung	98.02	99.17	98.52	94.77	81.45	87.67
06. Bangli	99.13	97.19	98.18	85.7	86.68	86.21
07. Karangasem	98.46	98.12	98.31	84.91	68.75	78.73
08. Buleleng	96.17	96.68	96.42	81.42	78.19	79.87
09. Denpasar	100	100	100	98.15	89.19	94.51
B A L I	98.23	98.33	98.27	89.68	84.04	87.16

Sumber : Statistik Pendidikan Provinsi Bali 2006, BPS Bali.

Secara umum bila dilihat berdasarkan tingkat pendidikan (Tabel 1), AMP tingkat SD di Provinsi Bali adalah sebesar 98,27 persen. Angka ini menunjukkan bahwa pada tahun 2006, dari 100 orang anak usia 7-12 tahun yang bertempat tinggal di Provinsi Bali, 98 orang diantaranya adalah siswa yang sedang bersekolah di tingkat sekolah dasar. Sedangkan AMP tingkat SLTP sebesar 87,16 persen, memiliki arti bahwa pada tahun yang sama, sekitar 87 dari 100 orang anak yang berusia 13-15 tahun dan bertempat tinggal di Bali, sedang bersekolah di tingkat SLTP.

Rasio AMP tingkat SD yang lebih tinggi dari AMP tingkat SLTP memberi arti bahwa masih terdapat anak usia sekolah dasar yang setelah menamatkan pendidikannya di tingkat SD, tidak melanjutkan kembali ke tingkat SLTP. Atau terdapat anak usia sekolah dasar yang berhenti sebelum menamatkan pendidikannya di tingkat SD, sehingga tidak bisa melanjutkan ke jenjang SLTP. Siswa yang berhenti bersekolah sebelum waktunya bisa terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja (terpaksa). Motivasi bersekolah yang mengendor adalah penyebab putus sekolah yang secara sengaja dilakukan oleh para siswa, sedangkan kemampuan financial keluarga yang rendah biasanya menyebabkan seorang siswa secara terpaksa harus berhenti bersekolah.

Bila dibandingkan berdasarkan sebaran wilayah Kabupaten/Kota, nampak dalam Tabel 1 bahwa AMP tingkat SD tertinggi dimiliki oleh Kota Denpasar dengan besar rasio 100 persen, dan AMP terendah untuk tingkat SD berada di Kabupaten Buleleng dengan rasio sebesar 96,42 persen. Untuk tingkat SLTP AMP tertinggi sebesar 94,51 persen ada di Kota Denpasar dan terendah sebesar 78,73 persen di Kabupaten Karangasem.

Keberhasilan Kota Denpasar dalam menyandang

predikat AMP tertinggi untuk tingkat SD dan SLTP, salah satunya disebabkan oleh kondisi wilayah Kota Denpasar sebagai ibu kota provinsi, yang bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya, masyarakat di Denpasar lebih mudah dalam mengakses kemajuan teknologi dan informasi yang mendukung pendidikan, serta fasilitas pendidikan yang lebih lengkap. Angka 100 persen untuk AMP tingkat SD di Kota Denpasar juga menunjukkan bahwa kesadaran dan kemampuan orang tua dalam memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak usia sekolah dasar mereka cukup tinggi. Dengan kata lain, tidak ada anak usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah di Kota Denpasar.

Berdasarkan jenis kelamin, AMP anak laki-laki dan perempuan di tingkat SD memiliki rasio yang sama sekitar 98 persen. Angka yang sama ini menunjukkan bahwa seluruh anak usia 7-12 tahun di Provinsi Bali, baik itu berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan di tingkat SD. Sementara untuk anak perempuan kelompok usia 13-15 tahun, memperoleh kesempatan yang lebih rendah dalam mengenyam pendidikan dibandingkan dengan anak laki-laki pada kelompok usia yang sama. Ini terbukti dari rasio AMP anak perempuan tingkat SLTP sebesar 84,04 persen, lebih rendah dari AMP anak laki-laki tingkat SLTP yang sebesar 89,68 persen.

Selisih rasio AMP antara anak laki-laki dan perempuan yang mencapai angka 5,64 persen untuk tingkat SLTP ini kembali menunjukkan bahwa masih ada perbedaan kesempatan untuk anak laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan yang layak. Persepsi bahwa perempuan yang nantinya akan menjadi ibu rumah tangga menyebabkan orang tua yang tergolong lemah dalam kondisi financial lebih memprioritaskan anaknya yang berjenis kelamin laki-laki untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTP.

## 2. Tingkat literacy (melek huruf) Anak Muda dan Remaja di Provinsi Bali pada Tahun 2006.

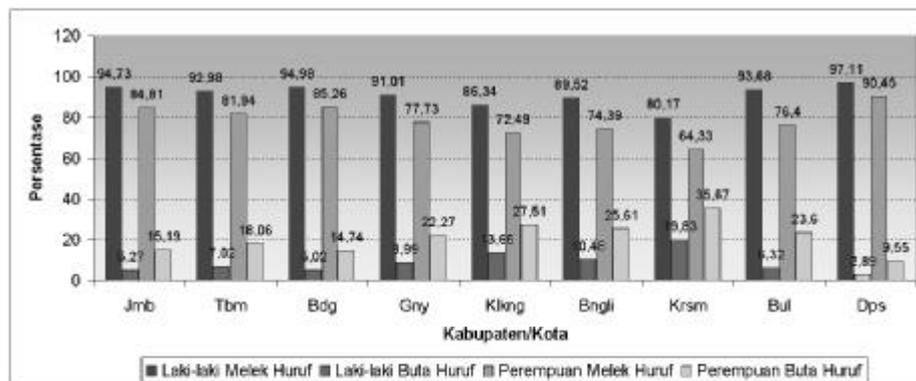
Penekanan angka melek huruf terutama pada usia remaja menjadi penting, mengingat keberhasilan usaha pemerintah di masa lalu dalam pemberantasan buta aksara dianggap keliru. Pelaksanaan program melek huruf pada zaman orde baru tidak memperhatikan usia sasarannya.

Upaya pemberantasan buta aksara bagi generasi muda kelompok usia 15-24 tahun, diharapkan dapat mempersiapkan anak muda

yang belum sempat sekolah, atau putus sekolah menghadapi target MDGs untuk pendidikan dasar di tahun 2015.

Grafik 1 menggambarkan kondisi melek huruf remaja di Provinsi Bali pada tahun 2006.

Grafik 1. Tingkat Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin di 9 Kabupaten/Kota di Bali, Tahun 2006 (persen)



Sumber : Statistik Pendidikan Provinsi Bali 2006, BPS Bali. (data diolah)

Statistik Pendidikan Provinsi Bali tahun 2006 menunjukkan, bahwa terdapat kesenjangan yang cukup besar antara persentase buta aksara remaja laki-laki dengan persentase buta aksara remaja perempuan. Sebanyak 20,48 persen penduduk Bali kelompok usia 15 tahun yang berjenis kelamin perempuan dinyatakan buta aksara, sementara untuk yang laki-laki hanya 8,00 persen. Faktor ekonomi disinyalir menjadi penyebab tingginya tingkat buta aksara remaja perempuan di Bali. Selain itu pola kultur matrilineal masyarakat Bali, dimana perempuan akan meninggalkan rumah, bagi sebagian masyarakat kerap dijadikan alasan untuk tidak memberikan pendidikan yang layak bagi anak perempuan mereka.

Bila dilihat berdasarkan sebaran wilayah Kabupaten/Kota di Bali (Grafik 1), kantong buta aksara terbesar untuk kelompok usia 15 tahun pada tahun 2006 berada di Kabupaten Karangasem, yaitu sebesar 35,67 persen untuk remaja perempuan dan 19,83 persen untuk remaja laki-laki. Sebaliknya jumlah buta aksara terendah ada di Kota Denpasar, masing-masing 9,55 persen untuk remaja perempuan dan 2,89 persen untuk remaja laki-laki. Angka ini memang bisa mengindikasikan bahwa semakin jauh wilayah satu kabupaten dari pusat ibu kota semakin rendah pula tingkat melek huruf penduduk usia 15 tahun di wilayah tersebut.

Generasi muda merupakan tulang punggung pembangunan bangsa. Karenanya cukup memprihatinkan

melihat fakta bahwa masih ada kasus buta aksara yang menimpa generasi muda di Bali (Grafik 1). Untuk itu angka buta aksara di kalangan remaja di Bali harus ditekan. Pemberantasan buta aksara pada usia muda tidak berjalan sendiri, atau hanya untuk target saat ini saja, tetapi mempunyai hubungan sangat erat dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, atau kualitas modal manusia, yang diperlukan untuk membangun keluarga, masyarakat atau bangsa.

### 3. Jumlah Siswa Drop-Out di Provinsi Bali pada Tahun 2006.

Proporsi siswa di kelas 1 yang berhasil menyelesaikan sembilan tahun pendidikan dasarnya, dapat diukur melalui banyaknya siswa di tingkat SD dan SLTP yang drop-out atau berhenti sekolah sebelum waktunya. Banyaknya siswa SD dan SLTP yang drop-out di

Provinsi Bali masih menjadi momok dalam pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun. Tabel 2 menunjukkan jumlah siswa drop-out di Provinsi Bali selama periode 2005/2006.

Tabel 2. Data Siswa Putus Sekolah di Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota Tahun Ajaran 2005/2006 (orang)

Kabupaten/Kota	SD	SLTP	Total
01. Jembrana	6	56	62
02. Tabanan	21	38	59
03. Badung	7	51	58
04. Gianyar	16	36	52
05. Klungkung	20	22	42
06. Bangli	101	39	140
07. Karangasem	220	96	316
08. Buleleng	300	75	375
09. Denpasar	13	18	31
<b>B A L I</b>	<b>704</b>	<b>431</b>	<b>1135</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Bali, 2006.

Data Dinas Pendidikan Provinsi Bali menunjukkan angka pelajar SD dan SLTP yang putus sekolah di Bali pada tahun ajaran 2005/2006 sebanyak 1.135 anak. Angka drop-out tertinggi ada pada jenjang SD dengan jumlah 704 anak, sedangkan pada jenjang SLTP sebanyak 431 anak. Angka ini memberikan arti bahwa kasus drop-out di Provinsi Bali lebih banyak menimpa anak-anak pada kelompok usia 7-12 tahun, yang berarti

kesempatan mereka untuk melanjutkan ke tingkat SLTP dan menyelesaikan pendidikan wajib belajar sembilan tahun semakin pupus.

Angka statistik pada Tabel 2 juga mengisyaratkan bahwa belum ada satupun Kabupaten/Kota di Bali yang berhasil bebas dari kasus drop-out. Dilihat dari sebaran wilayah Kabupaten/Kota di Bali angka drop-out tertinggi terjadi di Kabupaten Buleleng (sebanyak 375 anak), disusul Karangasem (sebanyak 316 anak), dan Bangli (sebanyak 140 anak). Bahkan Kabupaten Jembrana yang terkenal dengan kebijakan “bebas SPP” bagi para pelajarnya, juga mengalami kasus drop-out, yakni sebanyak 62 anak. Angka ini memosisikan Kabupaten Jembrana pada urutan keempat untuk wilayah kabupaten/kota dengan angka drop-out terbesar. Angka di atas kembali menunjukkan bahwa faktor geografis juga menjadi penyebab tingginya angka siswa drop-out di beberapa wilayah. Semakin jauh wilayah Kabupaten dari pusat ibu kota, semakin tinggi pula jumlah siswa usia sekolah yang drop-out.

Sedangkan hasil penelurusan Dinas Pendidikan Provinsi Bali (seperti yang dipublikasikan dalam Balipost, 23-09-06) menggambarkan bahwa faktor dominan yang menyebabkan ribuan pelajar di Bali itu putus sekolah adalah alasan ekonomi. Artinya, mayoritas penyandang predikat drop-out untuk jenjang SD dan SLTP pada tahun ajaran 2005/2006 itu berasal dari kalangan keluarga miskin. Disusul alasan lainnya, seperti terpaksa meninggalkan bangku sekolah lantaran tempat tinggal jauh dari sekolah.

Dari ketiga indikator sasaran di atas (APM, angka buta aksara, dan siswa drop-out) harus disadari adanya keharusan untuk mempersiapkan modal manusia yang dimulai pada usia yang sangat dini dan berlangsung lama. Upaya ini tidak sama dengan manufacturing manusia karena manusia tidak bisa di karbit, atau dikembangkan secara instan. Manusia harus dikembangkan dengan tahapan-tahapan yang bermutu dan berkelanjutan agar benar-benar menjadi manusia yang cerdas, bermutu dan dinamik.

## Penutup

Konsep pembangunan manusia yang berkualitas di Indonesia, mewajibkan setiap anak untuk memperoleh pendidikan dasar melalui program wajib belajar sembilan tahun. Akses pendidikan dasar yang harus dicapai untuk menuju MDGs 2015 adalah (a) meningkatkan angka partisipasi murni anak usia 7-15 tahun dalam pendidikan; (b) meningkatkan angka melek huruf penduduk usia remaja dengan rasio yang semakin merata; dan (c) meningkatkan proporsi siswa di kelas 1 agar berhasil menyelesaikan sembilan tahun pendidikan dasarnya, dengan menekan jumlah siswa drop-out di tingkat SD dan SLTP.

Tantangan yang dihadapi pemerintah Provinsi Bali dalam mencapai ketiga sasaran tersebut, selain karena faktor ekonomi dan budaya, juga faktor wilayah kabupaten yang jauh dari ibu kota provinsi. Data statistik pendidikan tahun 2006 menunjukkan dari sebaran wilayah, jumlah penduduk buta aksara terbanyak berada di wilayah Karangasem, Klungkung Bangli dan Buleleng, untuk jumlah siswa drop-out tingkat SD dan SLTP terbanyak adalah Buleleng, Karangasem dan Jembrana. Implementasi kebijakan yang bisa diambil pemerintah dari persoalan ini adalah bahwa wilayah-wilayah tersebut harus menjadi daerah prioritas dalam pembangunan manusia berkualitas melalui penyediaan fasilitas-fasilitas pendidikan yang setara dengan wilayah kota lainnya.

Implementasi kebijakan pemerintah yang menjadi impian masyarakat adalah menciptakan pendidikan yang “murah” tetapi tidak “murahan”. Artinya secara pembiayaan, masyarakat yang berasal dari golongan menengah masih mampu menjangkau, tetapi tidak menurunkan mutu dari pendidikan itu sendiri. Agaknya janji untuk menurunkan biaya pendidikan melalui peningkatan subsidi pemerintah yang dialokasikan dari dana APBN/APBD harus segera direalisasikan. Agar semua penduduk usia 7-15 tahun di Provinsi Bali dapat menikmati haknya untuk memperoleh pendidikan dasar, secara merata tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun.

## Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2006. Statistik Pendidikan Bali. Denpasar. Available from <http://bali.bps.go.id/2006/social/apssd.htm>; [aspmp.htm](http://bali.bps.go.id/2006/social/aspmp.htm); dan [bacatulis.htm](http://bali.bps.go.id/2006/social/bacatulis.htm). Denpasar.
- Bali Post edisi 23 September 2006. Seribu Lebih Pelajar di Bali “Drop Out”, Mesti Gratis Jembrana Ketiga. Available from <http://www.balipost.co.id/BALIPOSTCETAK/2006/9/23/b12.htm>.
- Dinas Pendidikan Propinsi Bali. 2006. Data Siswa SD dan SMP Putus Sekolah Tahun Ajaran 2005/2006. Denpasar.
- Harefa, Mandala. 2007. Alokasi Anggaran 20 Persen. [Cited 29-7-2008]. Available from <http://els.bappenas.go.id/upload/kliping/Alokasi%20anggaran%20pendidikan.pdf>.
- Lie, Anita. 2004. Menuntut Tanggung Jawab Negara atas Pendidikan. Kompas Cyber Media- Edisi 5/8/2004

Suyono, Haryono. 2000. Target MDGs Ketiga. Available from [http://www.haryono.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=782&Itemid=45](http://www.haryono.com/index.php?option=com_content&task=view&id=782&Itemid=45)

Unicef. 2004. Pendidikan Dasar untuk Semua. [Cited 29-7-2008]. Available from [http://www.unicef.org/indonesia/id/education\\_3141.html](http://www.unicef.org/indonesia/id/education_3141.html)

UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Wikipedia Indonesia. Definisi Pendidikan. [Cited 29-7-2008]. Available from <http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan>.

Luh Gede Meydianawathi, menamatkan pendidikan S2 pada Program Magister Ekonomi Pembangunan FE Unud. Ketertarikannya pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan, membuatnya aktif mengikuti berbagai penelitian dan pengabdian di bidang kependudukan, keuangan mikro dan pendidikan. Dosen jurusan IE Unud ini juga aktif sebagai tim peneliti di Yayasan Uluangkep Bali. Telp (+62)8179710959. Email: meydiana\_wathi@yahoo.co.id.